

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT  
(Studi diKecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**CUT RAZI MIRSANDI**  
NIM. 140404059

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440 H / 2019 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

**CUT RAZI MIRSANDI**

**NIM. 140404059**

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Drs. Muchlis Aziz, M. Si**

**NIP. 19571015 199002 1 001**

**Zamzami, M. Kesos**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

CUT RAZI MIRSANDI  
NIM. 140404059

Pada Hari/Tanggal  
Selasa, 22 Januari 2019 M  
16 Jumadil Awal 1440 H

di

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
NIP. 195710151990021001

Sekretaris,

Zanzami M.Kesos

Anggota I,

Nurul Husna, S.Sos.L., M.Si  
NIP. 19780612200712002

Anggota II,

Eurosa, MA  
NIDN. 1315098702

جامعة الرانيري

- R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,

  
Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
Nip. 196411291998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Razi Mirsandi

NIM : 140404059

Jenjang : Sarjana (S-1)

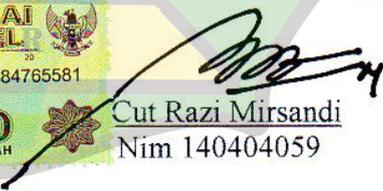
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupataen Aceh Barat Daya)*" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



  
Cut Razi Mirsandi  
Nim 140404059

## KATA PENGANTAR



Awal langkah mari sama-sama kita banyak memuji Allah SWT, karena Allah telah menghidupkan kita bersama dalam iman dan islam. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, dan juga kepada yang mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat kelak.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. Muchlis Aziz, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Zamzami, M.Kesos sebagai pembimbing kedua. Keduanya tidak hanya memberi bimbingan dan arahan akan tetapi juga memberikan motivasi kepada penulis serta bantuan dengan tulus ikhlas dari awal hingga selesainya skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu

Rasyidah, M.Ag sebagai ketua jurusan dan juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak nasihat serta dorongan yang kuat kepada penulis, dari awal pengajuan proposal, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, beserta staf-staf tata usaha dan akademik yang sangat membantu penulis dalam hubungan surat-menyurat yang berkaitan dengan penulisan skripsi serta kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA dan juga kepada semua dosen yang senantiasa memotivasi penulis dan telah membekali penulis dengan banyak Ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada camat beserta jajarannya yang bertugas di kecamatan Setia, juga kepada Operator PKH dan kepada Pendamping PKH Kecamatan Setia, serta kepada Keuchik juga masyarakat Kecamatan Setia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan dalam penulisan ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang yaitu, Alm. Ayahanda Nyak Gam dan Ibunda Ardianiwati yang senantiasa memberikan dukungan beserta do'a yang tiada hentinya dipanjatkan bagi penulis, juga saudara-saudara tercinta, kakak Rasma, abang Amran, abang Arman dan abang Helmi Masri.

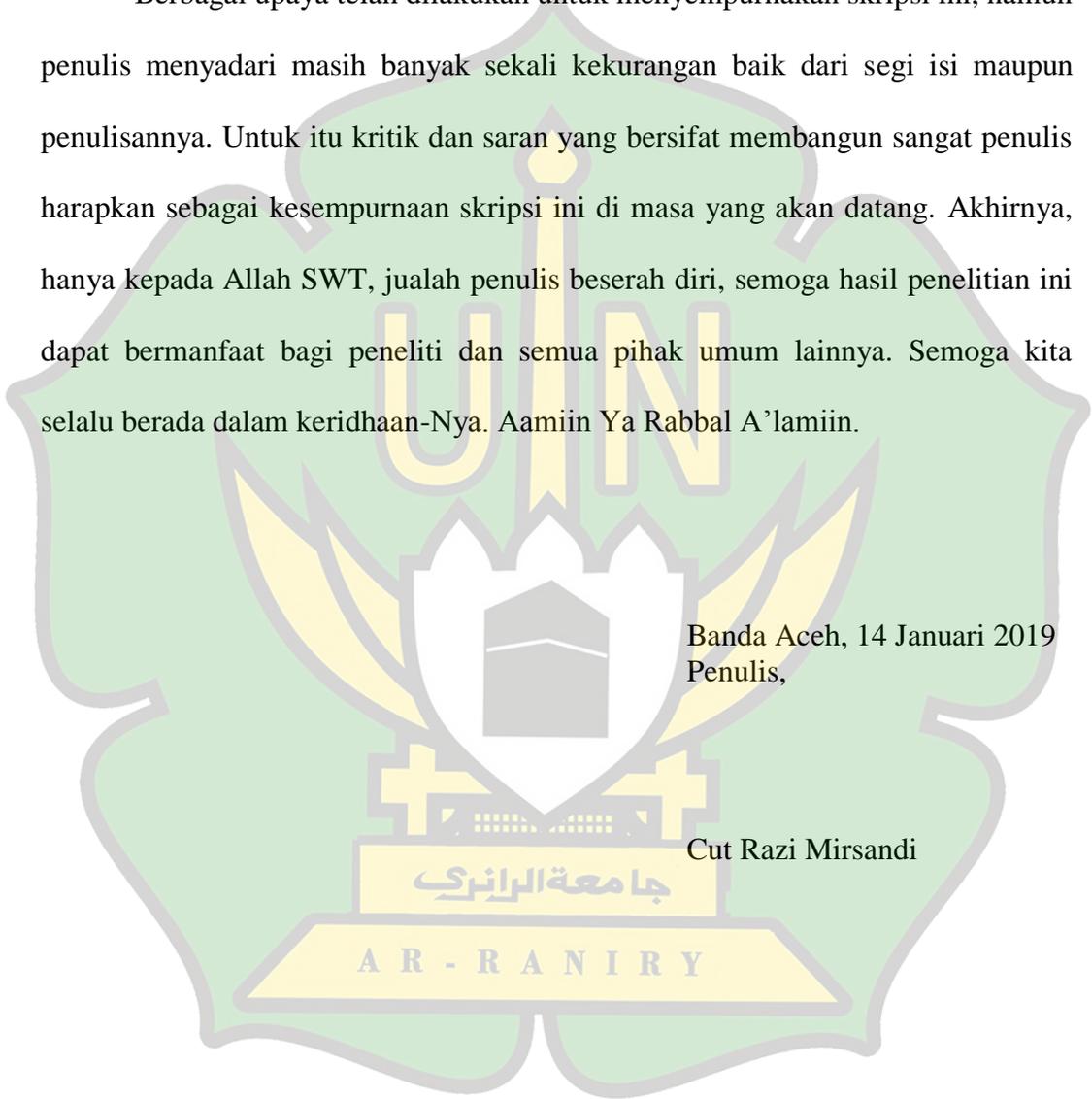
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat terbaik Muhazir, Qhusmaya Fitri, Julwanda Gustama, Mauliy Nabila, Raihan Agustin, Maisarah, Nailul Akram, Fatimah, dan kepada teman-teman KPM Ida Suwarni, Ikhsan, dan Irvan Irawan yang selalu memberi

dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi dan seluruh kawan-kawan jurusan PMI-KESSOS yang telah membantu penulis, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, jualah penulis beserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak umum lainnya. Semoga kita selalu berada dalam keridhaan-Nya. Aamiin Ya Rabbal A'lamiin.

Banda Aceh, 14 Januari 2019  
Penulis,

Cut Razi Mirsandi



## Abstrak

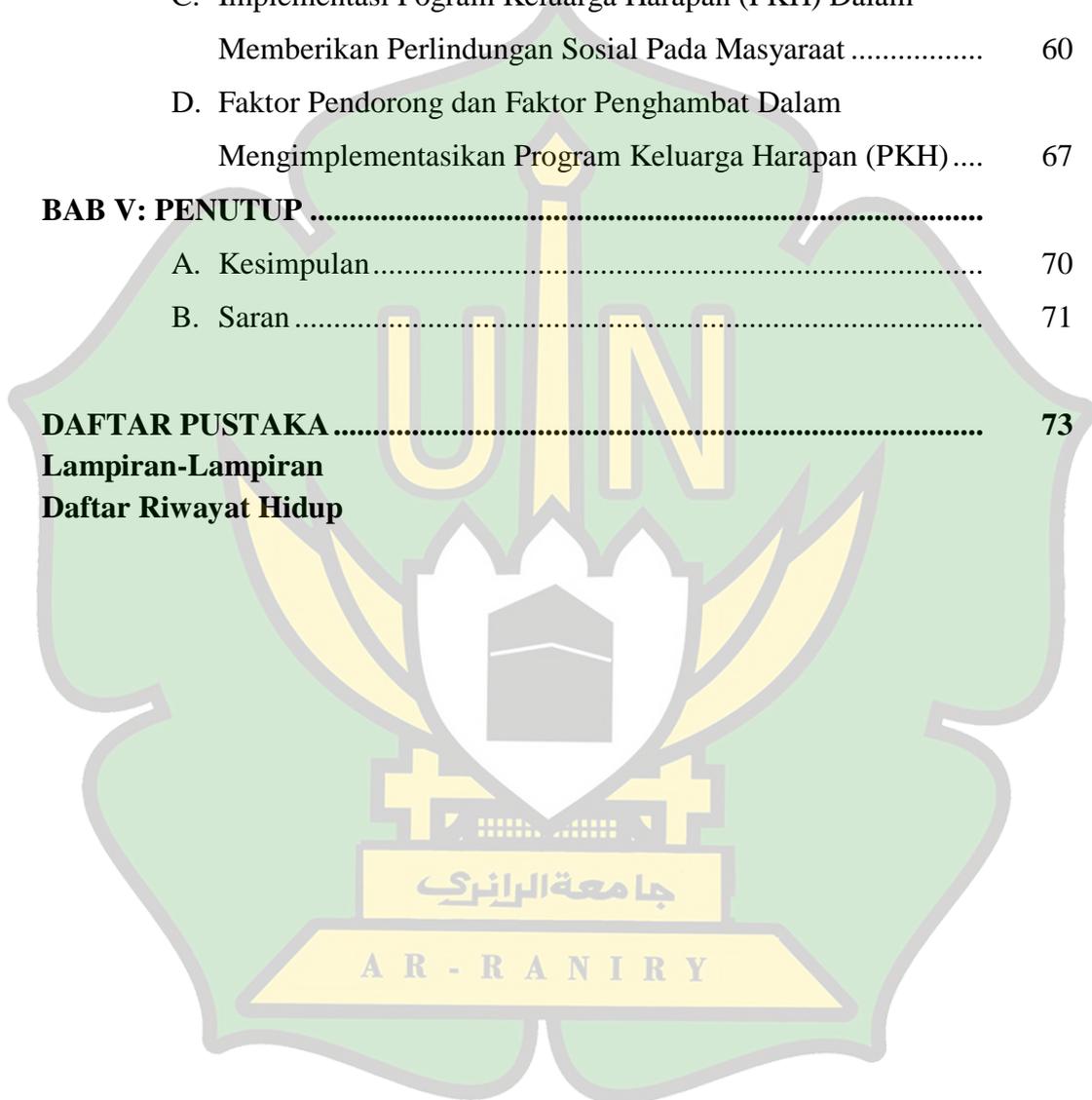
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pembentukan dan sumber daya manusia fokus pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat, untuk mengetahui Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan untuk mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel dengan ketentuan ciri-ciri dan karakteristik objek dalam penelitian (*purposive sampling*), adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Kecamatan Setia melalui beberapa tahapan yang pertama dimulai dari tahap pertemuan awal, tahap kedua memasukkan data kesistem informasi Manajemen, tahap ketiga pembayaran dan yang terakhir verifikasi komitmen. Faktor pendorong dan penghambat PKH yang di laksanakan di kecamatan Setia yaitu meski pun belum sepenuhnya terlaksanakan dengan sempurna, tetapi masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, PKH, Perlindungan sosial dan masyarakat

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Penjelasan Istilah.....	14
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....</b>	
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	19
B. Implementasi Program.....	22
C. Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada masyarakat .....	29
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) .....	29
2. Dasar Hukum dan Macam-Macam Program Keluarga Harapan (PKH) .....	30
D. Perlindungan Sosial dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH.....	36
E. Konsep Perlindungan Sosial Para Tokoh .....	43
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	
A. Pendekatan Metode Penelitian.....	48
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	50
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
B. Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam memberikan Perlindungan Sosisal Pada Masyarakat .....	56
C. Implementasi Pogram Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyaraat .....	60
D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH)....	67
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) perdesa di Kecamatan Setia Kabupaten aceh Barat Daya .....47



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
- Lampiran 4 : Surat Keteangan Selesai Penelitian dari Camat Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya
- Lampiran 5 : Surat Keteangan Selesai Penelitian dari Keuchik Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya
- Lampiran 6 : Surat Keteangan Selesai Penelitian dari Keuchik Desa Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Lampiran 8 : Daftar Gambar Hasil Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun Hongaria. Semua negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.<sup>1</sup>

Di Indonesia istilah kesejahteraan sosial bukanlah yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah,

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta, Cet-II Juli 2013), hal. 14.

mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.<sup>2</sup> sedangkan kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multimendisional yang dialami oleh hampir seluruh negara maupun daerah. Kemiskinan sudah menjadi kondisi yang biasa bagi negara berkembang seperti indonesia, masih banyak sekali rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan.<sup>3</sup>

Para ulama dan cendikiawan telah mengedepankan sejumlah analisis mengenai kemiskinan yang diderita anak manusia. Pada satu sisi kemiskinan dikategorikan kepada dua macam.<sup>4</sup> *Pertama*, kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang menimpa individu-individu tertentu dalam sebuah masyarakat. *Kedua*, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang menimpa masyarakat disebabkan non individu.

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005), hal. 1.

<sup>3</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 125.

<sup>4</sup> Syahrin Harahap, *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Pt. Tiara Wacana Yogya, Cet-I, September 1998), hal. 85.

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dapat dibagi tiga, yaitu:<sup>5</sup>

*Pertama*, faktor internal manusia, yaitu faktor yang muncul dari manusia itu sendiri, seperti; (1) lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur, dan tidak bergairah. (2) kurangnya disiplin dan pengaturan waktu secara tepat. Faktor-faktor ini kemudian melemahkan tingkat produktifitas seseorang, yang mengakibatkan rendahnya status sosial ekonominya di tengah masyarakat.

*Kedua*, Kemiskinan bisa terjadi disebabkan faktor non-individual seperti penyelenggara pemerintahan yang korup dan sejenisnya, yang menyia-nyiakan daya dan tenaga rakyat untuk kebobrokan birokrasi yang merugikan. Kemiskinan ini juga sering dikaitkan dengan sistem ekonomi yang berorientasi kapitalis yang menguntungkan para pemilik modal saja. Sebab dalam sistem semacam ini rakyat akan banyak didominasi dan dieksploitasi.

*Ketiga*, visi teologi yang represif. Faktor ini terlihat berkembang luas di tengah masyarakat beragama, yaitu adanya kecenderungan sebagian umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suatu yang telah menjadi suratan takdir dan kepastian yang datang dari tuhan.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau

---

<sup>5</sup> Ihsan Alief, Islam dan kemiskinan: *Soal Aktualisasi Keagamaan dalam Mimbar Ulama*, No.107 Tahun x,( Juli 1986), hal. 13-15.

ketrampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan insfrastruktur yang terbatas. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor yaitu, faktor individual, faktor sosial, faktor kultural dan faktor struktural.<sup>6</sup>

Kemiskinan juga mengakibatkan seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mengakses, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar wilayah daerah tinggalnya, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Program pengentasan kemiskinan selama ini terkadang hanya berupa bantuan yang bersifat kontemporer saja yang justru menimbulkan ketergantungan dan bukan pada proses pemberdayaan yang diarahkan pada penggalian, pemamfaatan dan optimalisasi kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat serta pemberian kekuasaan kepada masyarakat miskin.

Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan pada awal perkembangan, sering kali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya industrialisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembangunan yang terlalu berfokuskan pada pembangunan ekonomi justru tidak jarang meningkatkan kesenjangan ekonomi antara mereka yang kaya dan miskin. Sehingga ketika pembangunan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang baik,

---

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta, Cet-II Juli 2013), hal. 17-18.

ternyata angka kesenjangan pendapatan antara si kaya dan miskin menjadi meningkat.<sup>7</sup>

Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih menuju pada kemaslahatan bersama, diharapkan tidak ada satu kelompok masyarakat yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Pijakan ini bukan saja hanya karena keadilan sosial yang merupakan prasyarat untuk sebuah keutuhan tetapi juga realitas bahwa bumi Indonesia didiami oleh berbagai macam suku dan budayanya, agama, etnis yang beragam, sehingga tanpa didasari oleh keadilan niscaya keberagaman tersebut berpotensi menyulut konflik, dengan begitu pilihan keadilan sosial sebagai salah satu pilar negara merupakan pilihan cerdas dalam menegakkan negara kesatuan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa:

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.<sup>8</sup>

Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan

---

<sup>7</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-II Januari 2013), hal. 38.

<sup>8</sup> Kementerian Sosial, “*Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*”. Diakses pada tanggal 22 juni 2016 dari <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No11-2009.pdf>.

rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal disetiap negara.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas peneliti bisa mengetahui bahwa perlindungan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang cacat, keluarga dan anak-anak. Perlindungan sosial juga merupakan elemen penting dari strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi multi dimensi masalah yang dialami oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat data kemiskiskinan di Indonesia pada bulan September 2017 dengan jumlah mencapai 26,58 juta orang dengan persentase (10,12 persen),<sup>10</sup> ditingkat Provinsi Aceh angka kemiskinan mencapai 848,44 ribu orang dengan persentase (16,73 persen), sedangkan ditingkat Kabupaten Aceh Barat Daya angka kemiskinan mencapai jumlah 25,73 ribu orang dengan persentase (18,03 persen).<sup>11</sup> Begitu juga di Kecamatan Setia, kemiskinan masih menjadi persoalan dan pemerintah berusaha untuk mambantu masyarakat dalam menutupi kekurangan yang dibutuhkan masyarakat.

Kecamatan Setia bertepatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, tatanan kehidupan sosial masyarakatnya sangat majemuk, pendidikannya rata-rata mulai dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yang pendapatannya masih rendah, banyaknya pengangguran dan para ibu ada yang menjadi tulang punggung keluarga

---

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta, Cet-II Juli 2013), hal. 3.

<sup>10</sup> <http://www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-september-2017-diakses> 12 juli 2018

<sup>11</sup> *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*, (Badan Pusat Statistik), hal. 9.

dikarenakan suami sudah meninggal dunia. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Setia sudah dilakukan dengan berbagai program antara lain, pemberian bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Rastra (Beras Sejahtera) dan program pemerintah lainnya untuk keluarga miskin, tetapi upaya pengentasan kemiskinan tersebut belum dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain karena tidak tepat sasaran program, pendataan warga miskin yang tidak akurat, pengentasan kemiskinan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan bersifat sementara serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses sistem informasi dan rendahnya unsur pemberdayaan masyarakat. Banyaknya keluarga miskin sehingga memerlukan penanganan masalah secara bertahap dan berkesinambungan.

Proses kegiatan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengentasan kemiskinan di keluarga dan lingkungan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta bertujuan untuk menambah rasa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga

yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang di jadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.<sup>12</sup>

Di Kecamatan Setia, PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2014, jumlah penerima keseluruhan program PKH sebanyak 643 penerima dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Setia dengan persebaran penduduk mencapai 7.849 jiwa. Bantuan yang diberikan kepada KPM berupa uang dengan masa penarikan setiap tiga bulan sekali dalam setahun dengan jumlah uang yang diterima secara keseluruhan Rp. 1.850.000 dan khusus lansia mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 dalam setahun.<sup>13</sup>

Tabel. Data jumlah penerima Program keluarga Harapan (PKH) perdesa di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.

No	Desa	Jumlah Penerima
1	2	3
1	Alue Dama	114
2	Pisang	73
3	Rambong	58
4	Lhang	112
5	Kuta Murni	28
6	Ujung Tanah	59

<sup>12</sup> Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 7.

<sup>13</sup> Hasil wawancara bersama bapak Efendi, (pendamping Program Keluarga Harapan) Setia, tanggal 10 Januari 2018

7	Cinta Makmur	49
8	Tangan-Tangan Cut	119
9	Mount Mameh	31
10	Total	643

Sumber: Operator PKH Aceh Barat Daya, tahun 2018

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah peserta penerima bantuan PKH terbanyak berada di desa Tangan-Tangan Cut dengan jumlah 119 orang, selanjutnya desa Alue Dama dengan jumlah penerima 114 orang, desa Lhang dengan jumlah penerima sebanyak 112 orang, desa Pisang 73 orang, desa Ujung Tanah 59 orang, desa Rambong 58 orang, desa Cinta Makmur 49 orang, desa Mount Mameh 31 dan yang terakhir adalah desa Kuta Murni dengan jumlah penerima sebanyak 28. Jadi desa yang paling banyak penerimanya adalah desa Tangan-Tangan Cut sebanyak 119 orang.

Adapun data graduasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Setia ada dua, yaitu, *pertama*, graduasi KPM karena dari keluarga mampu berjumlah 6 orang, dari Desa Mon Mameh 1 orang, Rambong 3 orang dan Cinta Makmur 1 orang. *Kedua*, graduasi KPM yang keluar dengan kemauan sendiri ada 1 orang, yaitu dari Desa Pisang.

Adapun kegiatan PKH di Kecamatan Setia yaitu membentuk kelompok yang mana setiap kelompok ada ketuanya, mengadakan pertemuan dan diskusi rutin dalam waktu satu bulan sekali yang didampingi oleh pendamping PKH, dalam pertemuan tersebut membahas tentang komitmen para peserta PKH yang telah difasilitasi bagian pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Permasalahan yang sering muncul dilapangan saat mengimplementasikan program yaitu ketika pihak pendamping mengarahkan juga memberi tekanan kepada KPM agar mau mengikuti prosedur ataupun aturan yang harus dituruti KPM harus mau memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta penerima mamfaat dari program PKH, kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang masih bandel dia hanya mengiyakan saja tanpa benar melaksanakan sesuai perintah serta arahan yang telah di jelaskan dari pendamping PKH, seperti anak yang malas pergi sekolah, anak yang tidak lengkap atribut sekolah itu merupakan tanggung jawab orang tua dan masih ada juga masyarakat malas keposyandu ketika waktu mengunjungi posyandu tiba.

Masalah lain yang sering datang juga ketika protes-protes yang dilayangkan kepada pendamping PKH yang bahwasanya kenapa kami sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal kami layak juga untuk menerima mamfaat dari program itu. Selanjutnya ada masalah lain, kurangnya respon dari stakeholder apabila diajak kerjasama artinya tidak ada sinergisitas kerja, ketika pihak pendamping menginginkan koordinasi dari pihak stakeholder kurang tanggapan.

Untuk menjawab bagaimana kondisi dan situasi di atas maka dilakukan kegiatan pemantauan melalui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, agar mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan serta peningkatan patisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah untuk mengeluarkan program PKH yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH di harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, Mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat dan Memastikan terpelihara taraf kehidupan sosial.<sup>14</sup>

Program PKH dilaksanakan oleh Pendamping Sosial PKH yaitu dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan melayani fasilitas peanganan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) hingga pada akhirnya Pendamping Sosial PKH harus benar-benar mampu menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

Dengan hadirnya program PKH di kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini sudah terbantu dengan hadirnya program-program yang dilaksanakan oleh PKH, contohnya seperti orang tua terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi buat bayinya, anak-anak kembali bisa bersekolah yang dulunya putus sekolah akibat ketidakmampuan biaya

---

<sup>14</sup> Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal.8.

sekolah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang tua. Sekarang sudah bisa sekolah lagi, orang tua yang lanjut usia sudah mendapat perhatian dengan hadirnya PKH, ini di angkat sebagai contoh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Untuk mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis
  - a. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
  - b. Bagi pogram Studi Pengembangan Masyarakat Islam/Konsenterasi Kesejahteraan sosial, hasil dari penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosial dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
2. Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan atau dapat menambah khazanah pengetahuan.

3. Secara praktis untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

#### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Kata implentasi berasal dari bahasa Inggris “*to Implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai suatu tujuan kegiatan secara maksimal.<sup>16</sup>

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara

---

<sup>15</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*/Tim Penyusun Pusat Bahasa, ed.-cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 427.

<sup>16</sup> <http://www.google.co.id/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp/diakses> pada tanggal 12 juli 2018

pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>17</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas bisa dipahami bahwa Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Adapun implementasi yang peneliti maksud disini adalah implementasi yang dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara

---

<sup>17</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.<sup>18</sup>

Edi Suharto mendefinisikan perlindungan sosial dalam bukunya yang berjudul *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*<sup>19</sup> sebagai sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemeralatan yang dihadapi oleh kelompok miskin beserta anak-anak mereka. Namun demikian, perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dari pengertian di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa perlindungan sosial merupakan sebuah konsep luas yang selalu berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Pemerintah dan berbagai organisasi di dunia telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial hingga pada negara-negara berkembang dalam beberapa dekade kebelakang. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah negara-negara di dunia berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya.

Perlindungan sosial yang peneliti maksud adalah perlindungan sosial yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat di Kecamatan

---

<sup>18</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Cetakan-I, Desember 2014), hal. 2.

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta, Cet-II Juli 2013), hal. 3.

Setia Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.<sup>20</sup> Adapun masyarakat menurut Kamus Sosiologi adalah kelompok orang-orang yang menduduki wilayah geografis tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan mampu bertindak secara kolektif untuk mencapai suatu tujuan.<sup>21</sup> Sedangkan masyarakat menurut ilmu sosiologi adalah sekelompok manusia yang tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang ditentukan bersama.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Syani mengatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang mendefinisikan masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas kita dapat memahami yang bahwasanya masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 751.

<sup>21</sup> Kartasapoetra, Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 64.

<sup>22</sup> Elly M. Setiadi, Usman Kholid, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 37.

<sup>23</sup> [www.artikelsiana./pengertian-masyarakat-para-ahli-definisi.html](http://www.artikelsiana./pengertian-masyarakat-para-ahli-definisi.html). diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Masyarakat yang peneliti maksud adalah masyarakat di Desa Lhang dan Desa Rambong yang berada di dalam kawasan Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah di teliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanda Fajria dengan judul: “Efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kembang Tanjong”. Tujuan dari penelitiannya yaitu: “untuk mengetahui bagaimana efektivitas PKH di Kecamatan Kembang Tanjong” dan “untuk mengetahui bagaimana pemamfaatan PKH di Kecamatan Kembang Tanjong”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah “observasi, wawancara dan dokumentasi”. Hasil penelitian Nanda Fajria mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di kecamatan Kembang Tanjong sudah baik dan efektif. Menurut Nanda efektifitas PKH tergambarkan keberhasilannya melalui berkurangnya angka kematian ibu hamil atau nifas dan bayi di kecamatan Kembang Tanjong khususnya.<sup>24</sup>

Penelitian lainnya terkait dengan skripsi peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Badratin Nafis dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengembangan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: “Ingin mengetahui tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan” dan “Ingin mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Koa Sigli”.

---

<sup>24</sup> Nanda Fajria, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah “observasi dan wawancara”. Hasil penelitian Badratin Nafis mengatakan bahwa program Keluarga Harapan yang di laksanakan di kecamatan Kota Sigli belum terlaksanakan dengan sempurna karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang jalannya program, terlebih lagi keluarga-keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Walaupun demikian, masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat Kota Sigli.<sup>25</sup>

Penelitian lain yang berkaitan dengan skripsi peneliti oleh Yulius Tandigoa dengan judul: “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa”. Tujuan penelitiannya yaitu “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang” dan “Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah “wawancara sistematis, telah dokumen, dan observasi”. Hasil penelitian Yulius Tandigoa menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya, misalnya dari segi sumberdaya manusia yang masih belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta program keluarga harapan di kecamatan sesenapadang, dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program

---

<sup>25</sup> Badratin Nafis, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengembangan Pendidikan Masyarakat*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry, 2016).

keluarga harapan belum maksimal sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program ini.<sup>26</sup>

Penelitian lain yang berkaitan dengan skripsi penulis oleh Iqbal Nugraha dengan judul: “Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Unit Pelaksana (UPPKH) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur”. Tujuan penelitiannya yaitu “Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan Oleh Unit Pelaksana PKH Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah “wawancara, dokumentasi dan observasi” hasil penelitian Iqbal Nugraha menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kabupaten Lampung Timur secara umum sudah terimplementasi, dengan terlihat perkembangan yang baik setiap tahunnya akan tetapi masih terdapat Hambatan proses Implementasi meliputi kendala dalam pelaksanaan penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) akibat sumber data yang tidak akurat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemutahiran data akibat tidak terpenuhinya sebagian prasyarat administratif, serta keterlambatan pelaksanaan verifikasi komitmen akibat kinerja oknum petugas pendamping PKH yang kurang optimal, serta koordinasi antar lembaga pendukung yang belum maksimal.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dijalankan sejak tahun 2014. Tujuan dari pada penelitian ini ingin mengetahui

---

<sup>26</sup> <https://anzdoc.com/skripsi-implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-di-kecamatan.html>, diakses pada tanggal 24 januari 2019.

<sup>27</sup><http://digilib.unila.ac.id/54602/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 24 januari 2019.

Apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat, ingin mengetahui Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan ingin mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **B. Implementasi Program**

### **1. Pengertian Implementasi**

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>28</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>29</sup>

Presman dan Wildavsky, seperti yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebagaimana janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*),

---

<sup>28</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

<sup>29</sup> Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

untuk menghasilkan *output*, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).<sup>30</sup>

Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>31</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## 2. Pengertian Program

Program adalah sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga bahkan negara. Jadi seseorang, sekelompok organisasi, lembaga bahkan Negara mempunyai suatu program. Suharismi Ariskunto mengemukakan program sebagai berikut, program adalah

---

<sup>30</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal. 20.

<sup>31</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta, Rineka Cipta. 2002), hal. 67.

sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.<sup>32</sup>

Suatu Program juga merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.<sup>33</sup>

Dari definisi Implementasi dan program tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program adalah pelaksanaan ataupun penerapan suatu kegiatan yang mempunyai sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater, Edward III, Grindle dan Mazmanian dan Sabatier. Model Edwar mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Suharismi Ariskunto, *Penelitian Program Pendidikan*, (Yogyakarta, Bima Aksara, 1998), hal. 129.

<sup>33</sup> Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 349.

<sup>34</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Siduarjo, Bayumedia, 2006), hal. 96-106.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyalpmain informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam mengimplementasi kebijakan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan

kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.<sup>35</sup>

c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah :

- 1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang

---

<sup>35</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 143.

bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.<sup>36</sup>

d. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm. 154.

<sup>37</sup> Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

## C. Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial

### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang di jadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu.

Adapun tujuan dari program PKH, yaitu:<sup>38</sup>

a. Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum yaitu:

Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

b. Tujuan dari Program keluarga harapan (PKH) secara khusus yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH
- 3) Meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH

---

<sup>38</sup> Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 22.

- 4) Mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan dan pelayan kesejahteraan sosial dan Memastikan terpelihara taraf kesejahteraan sosial.

## 2. Dasar Hukum dan Macam-Macam Program Keluarga Harapan (PKH)

### a. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Program Keluarga Harapan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- 7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
- 8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir

Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)

11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).<sup>39</sup>

b. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Program Keluarga Harapan sudah diarahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu disabilitas, lansia, ibu dan anak.<sup>40</sup> Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Penerima bantuan adalah KPM yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Kementerian Sosial RI, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, (Jakarta 2018), hal. 1-3.

<sup>40</sup> Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, 2014, hal. 18.

<sup>41</sup> Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 24.

### 1) PKH Bidang Pendidikan

Komponen peserta PKH bidang pendidikan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Anak SD
- b) Anak SMP, dan
- c) Anak SMA

### 2) PKH Bidang Kesehatan

Komponen peserta PKH bidang kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Ibu hamil/nifas
- b) Anak bayi
- c) Anak balita, dan
- d) Anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

### 3) PKH Bidang Kesejahteraan Sosial

Komponen peserta PKH bidang kesejahteraan sosial adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Penyandang disabilitas berat
- b) Lansia usia 70 ke atas

KPM yang terpilih sebagai peserta PKH mendapatkan kartu yang digunakan untuk memperoleh bantuan non-tunai bersyarat. Kartu PKH merupakan bukti kepesertaan. Sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada

tahun 2012 kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas sementara untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, apabila KPM tidak memiliki kartu Jamkesmas.<sup>42</sup>

Bantuan non-tunai bersyarat akan disalurkan kepada peserta PKH setiap 3 bulan sekali dalam setahun. Bantuan tahap pertama diberikan jika peserta PKH telah menghadiri pertemuan awal yang dikoordinir oleh UUPKH Kecamatan dan telah mengunjungi pemberi pelayanan kesehatan.<sup>43</sup>

Bantuan tahap berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH adalah telah memenuhi komitmen yang diverifikasi dalam bentuk formulir oleh pendamping PKH. Peserta PKH akan mendapatkan bantuan apabila memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tujuan utama PKH yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan adalah:

a. Kewajiban Bidang Pendidikan

Peserta diwajibkan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang berusia 7-15 tahun yang belum terdaftar di sekolah. Anak yang berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan atau buta aksara harus

<sup>42</sup> Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayan Kesehatan*, 2014, hal. 9.

<sup>43</sup> UUPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH, tugas dan tanggung jawab UUPKH Kecamatan (pendamping PKH) secara umum melakukan tugas pendamping kepada peserta PKH dengan wilayah kerja meliputi seluruh Desa dalam satuan kerja wilayah kecamatan yang diatur oleh Ketua UUPKH Kabupaten/Kota.

didaftarkan segera di kesatuan pendidikan formal atau non formal. Pendamping diwajibkan mendampingi peserta PKH yang melakukan pendaftaran anak kepada kesatuan pendidikan dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan selama setahun ajaran berlangsung.

b. Kewajiban Bidang Kesehatan

KPM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam aturan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- 1) Anak bayi usia 0-11 bulan, imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
- 2) Anak bayi usia 6-11 bulan, mendapat suplemen vit A
- 3) Anak balita usia 1-5 tahun, imunisasi tambahan dan pemeriksaan badan, setiap bulan
- 4) Anak balita usia 5-6 tahun, pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapat vit A sebanyak 2 kali dalam setahun.
- 5) Anak balita usia 6-7 tahun, timbang badan di faskes

c. Kewajiban Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1) Penyandang disabilitas berat

Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

2) Lansia usia 70 tahun ke atas

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Mengikuti kegiatan sosial (*day care and home care*).<sup>44</sup>

#### **D. Perlindungan Sosial dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH**

##### 1. Pengertian Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan sebuah konsep luas yang selalu berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Pemerintah dan berbagai organisasi di dunia telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial hingga pada negara-negara berkembang dalam beberapa dekade ke belakang. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah negara-negara di dunia berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya. Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi para pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan, dan layanan lainnya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 28.

<sup>45</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, (Jakarta: Direktorat

Pada sisi lain, ILO (2002) dalam “*Social Security and Coverage For All*” mengemukakan bahwa perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi sosial pada tingkat internasional. Konsep ini termasuk jaminan sosial (*social security*) dan skema-skema swasta. Lebih jauh dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam tiga lapis: pertama, merupakan jejaring pengamanan sosial yang didanai penuh oleh pemerintah. Kedua, merupakan skema asuransi sosial yang didanai penuh dari kontribusi pemberi kerja dan pekerja. Ketiga, merupakan provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan contributor dana dalam setiap skema.<sup>46</sup>

Dari definisi perlindungan sosial yang di atas bisa dipahami bahwa perlindungan sosial adalah rencana pembangunan nasional diartikan sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat yang paling miskin dan kelompok masyarakat miskin.

## 2. Tujuan Perlindungan Sosial

Ada tiga tujuan utama perlindungan sosial adalah untuk:

- a. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.

---

Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Cetakan-I, Desember 2014), hal. 3.

<sup>46</sup> Bambang Rustanto, *Sistem Perlindungan Sosial*, (Bandung, STKSPRESS, Cet-I 2014), hal. 23.

- b. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial-ekonomi.
- c. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi kegenerasi lainnya.<sup>47</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Sosial

Adapun bentuk-bentuk Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

#### a. Bantuan Sosial

Adapun bentuk-bentuk bantuan sosial dapat berupa:<sup>48</sup>

- 1) Transfer uang atau barang, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan ataupun pemberian kursi roda, tongkat dan komputer braile bagi penyandang cacat atau ODKK.
- 2) Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan atau program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang memadukan transfer uang (peningkatan daya beli) dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 3) Subsidi temporer, seperti program Raskin, minyak tanah bersubsidi, bantuan uang muka atau perumahan dan penjualan sembako murah di masa krisis.

---

<sup>47</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta, Cet-II Juli 2013), hal. 42-43.

<sup>48</sup> Ibid, hal. 48.

4) Skema “pengamanan sosial”, yakni pengamanan (*safeguard*) yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan menyusul adanya dampak-dampak negative jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.

b. Advokasi Sosial

Advokasi sosial dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan orang miskin biasanya dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayan sosial atau merancang-kembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, pelayanan sosial itu sangat dibutuhkan klien individu, kelompok maupun masyarakat. Ketimbang memberi bantuan barang/uang secara langsung, pekerja sosial berkolaborasi dengan beragam *stakeholders* dan berupaya menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah dan kemampuan memenuhi kebutuhan klien.<sup>49</sup>

c. Bantuan Hukum

1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>49</sup> Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hal. 167.

- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

#### 4. Manfaat Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.<sup>50</sup>

Beberapa manfaat dari perlindungan sosial, diantaranya:

- a. Terlindunginya manusia dari berbagai resiko sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan.
  - b. Meningkatnya kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi kemiskinan serta keluarnya dari kemiskinan dimaksud.
  - c. Keluarga miskin memiliki standar hidup bermartabat
  - d. Tercapainya dan terselenggaranya kesejahteraan sosial.
5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung

---

<sup>50</sup> <http://justinlase.blogspot.com/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html/> diakses pada tanggal 14 juli 2018.

Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).<sup>51</sup>

a. Syarat Pembentukan dan Keanggotaan KUBE

- 1) Prioritas utama KUBE produktif/berkembang yang pernah dibantu dana dekonsentrasi/APBD/Masyarakat/Dunia Usaha.
- 2) Setiap KUBE beranggotakan berjumlah 10 KK.
- 3) Anggota berusia antara 15-55 tahun dan sudah berkeluarga.
- 4) Memiliki kegiatan sosial dan UEP.
- 5) KUBE yang sudah memiliki pembukuan atau catatan keuangan.
- 6) Diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan direkomendasikan oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

b. Tujuan

KUBE bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- 2) Peningkatan pendapatan.
- 3) Pengembangan usaha.
- 4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

---

<sup>51</sup> <https://www.kemosos.go.id/content/kube>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

c. KUBE di Kecamatan Setia

Kelompok usaha bersama di kecamatan setia ada satu kelompok yaitu kelompok usaha e-warung, pengurusnya beranggotakan sepuluh orang KPM. Pengurus e-warung ini dipilih oleh para pendamping PKH tingkat Kecamatan. Usaha e-warung ini menjual bahan sembako kecuali rokok, rokok memang dilarang diperjualbelikan dalam usaha ini.

Adapun usaha ini didanai oleh Kementrian Sosial yang ditransfer langsung kerekening ketua kelompok, dalam rekening tersebut ditandatangani oleh ketua kelompok dan pendamping PKH dengan rinciannya yaitu Rp. 20.000.000, digunakan untuk peralatan jualan serta untuk memasukan barang dagangan dan RP. 10.000.000, digunakan untuk rehap tempat jualan. Usaha ini diawasi dan dikontrol langsung oleh para pendamping PKH di Kecamatan tersebut.<sup>52</sup>

**E. Konsep Perlindungan Sosial Para Tokoh**

Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dan Observasi Bersama Bapak Efendi, Pada Tanggal 28 Agustus 2018.

hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya.<sup>53</sup>

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional. Lebih luas, perlindungan sosial dapat dideskripsikan sebagai seluruh tindakan (baik yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan kelompok miskin, melindungi kelompok rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarginalisasi di setiap negara.<sup>54</sup>

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara memandang perlindungan seosial sebagai elemen kunci dalam kelangsungan kehidupan serta pembangunan ekonomi

---

<sup>53</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Cetakan I, Desember 2014), hal. 6.

<sup>54</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2007), hal. 123.

berkelanjutan. Itulah sebabnya, dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, penguatan sistem perlindungan sosial merupakan hal yang amat krusial. Pentingnya isu perlindungan sosial tersebut dapat terlihat dari ditetapkannya perlindungan sebagai isu prioritas pada pernyataan Visi dan Misi Menteri Tenaga Kerja ASEAN pada bulan Mei 2000, yang program kerjanya berakhir 2001. Program ini memfokuskan pada upaya mengikutsertakan seluruh negara dikawasan Asia Tenggara serta mengembangkan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi pada tingkat regional ASEAN.<sup>55</sup>

Menurut Barrientos dan Shepherd, perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial.<sup>56</sup>

Menurut Scott, konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab

---

<sup>55</sup> Ibid, hal. 121.

<sup>56</sup> Bambang Rustanto, Sistem Perlindungan Sosial, (Bandung, STKSPRESS, Cet-I 2014), hal. 23.

kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan.<sup>57</sup>

Menurut Guhan, memandang bahwa Konsep perlindungan sosial memiliki komponen yang lebih luas, diantaranya mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Komponen promosi mencakup kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang.<sup>58</sup>

Menurut U.K. Department for International Development (DFID) (1999), terdapat setidaknya tiga jalur untuk mewujudkan konsep pendekatan perlindungan sosial yang seimbang. *Pertama*, melalui peningkatan keamanan dengan membantu rumah tangga dan komunitas untuk meningkatkan kesinambungan penghidupannya dalam menghadapi guncangan ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, serta bentuk guncangan lainnya. *Kedua*, melalui peningkatan kesetaraan dengan memperbaiki tingkat penghidupan untuk menjamin keterpenuhan hak-hak dasar seluruh penduduk serta dengan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. *Ketiga*, melalui peningkatan pertumbuhan dengan menjamin akses setiap rumah tangga untuk menghasilkan tenaga kerja yang

---

<sup>57</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Cetakan I, Desember 2014), hal. 7.

<sup>58</sup> Ibid, hal. 7.

produktif, membangun nilai-nilai solidaritas sosial, serta menyediakan lingkungan yang menjamin kemudahan individu dalam beradaptasi. Sementara itu, Scott juga menambahkan bahwa tipe program perlindungan sosial yang paling umum mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, intervensi pasar tenaga kerja, dan program berbasis komunitas/informal. Van Ginneken serta Ferreria dan Robalino mengklasifikasikan program perlindungan sosial menjadi dua kelompok, yakni program bantuan sosial dan program jaminan sosial.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 6-8.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan.<sup>63</sup> Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti.<sup>64</sup>

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sumardi Suryabrata dalam buku Soejono, Abdurrahman (Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan), menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat.<sup>65</sup>

Penelitian ini juga tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), yang dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Seorang

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 3.

<sup>64</sup> Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

<sup>65</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hal. 21-22.

peneliti berangkat langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.<sup>66</sup>

## **B. Subjek Penelitian dan Teknik pengambilan Sampel**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Setia, yaitu yang berada di Desa Lhang dan Rambong dari 9 Desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Setia.

Sampel dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil salah satu teknik yang ada dalam *probalility sampling*, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah metode penetapan sample berdasarkan kriteria tertentu.<sup>67</sup> Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program tingkat Kabupaten, Pendamping PKH Kecamatan Setia, *Keuchik* dalam Kecamatan Setia Sebanyak 2 orang dan Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) sebanyak 8 orang yang terdata sebagai anggota Program Keluarga Harapan dengan kriteria tertentu, keluarga yang mempunyai anak dalam usia sekolah, keluarga yang mempunyai bayi dan keluarga yang mempunyai ibu hamil/nifas dalam keluarganya.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, peneliti gunakan karena memang sesuai dan cocok untuk penelitian ini dikarenakan informasi dan data yang peneliti butuhkan hanya dari objek

---

<sup>66</sup> Conny semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: gramedia,2010), hal. 9.

<sup>67</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiiah, *Metodologi Penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian*, Ed, 1, (Yogyakarta: Andi), hal. 188.

penelitian dengan kriteria tertentu yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seorang peneliti dalam menggunakan pengamatan melalui pancaindra mata yang ikut dibantu dengan pancaindra lain.<sup>68</sup>

Observasi dapat pula diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti, ada dua indra yang sangat vital dalam melakukan observasi, yaitu mata dan telinga.<sup>69</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan di kecamatan Setia, maka peneliti menggunakan metode observasi sebagai gambaran awal terhadap permasalahan yang diangkat juga untuk penambahan data penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan teknik observasi supaya dapat melihat langsung bagaimana implementasi Program keluarga harapan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

---

<sup>68</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 115

<sup>69</sup> Husaini usman, *Metodologi penelitian sosial*, edisi kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 52-53.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan serta langsung bertatap muka dengan informan. Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam artian peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah di susun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu untuk mewawancarai informan seperti pulpen atau pensil, buku tulis (notes), surat izin/surat tugas, soal yang telah disusun, instrument, alat perekam guna untuk merekam apa yang dikatakan oleh informan dan kamera guna untuk mengambil gambar yang sedang diwawancarai.

Esterberg (2002) dalam buku Sugiyono<sup>70</sup>, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* mendefinisikan wawancara/ interview sebagai berikut: Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga lahirnya atau dapat di bangun makna dalam suatu pembahasan tertentu.

Selain observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai sumber untuk mendapatkan dan menguatkan data atau informasi yang lebih mendalam yang didapatkan dalam penelitian ini melalui

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.

wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat *Gampong* juga beberapa pihak pelaksana program.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, pengabstrakan data, dan memilah-milah data yang sudah di kumpulkan baik itu dari rekaman, observasi maupun dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Maka peneliti dapat merekam, mengambil data yang pokok dan penting akan diolah menjadi data yang lebih mudah dipahami, di karenakan data-data yang di dapatkan belum tersusun dengan rapi. Maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan rapi sehingga pembaca nantinya lebih mudah memahaminya.

Teknik analisis data adalah proses mencari solusi dalam bentuk yang lebih mudah di mengerti. Setelah data dikumpulkan, kemudian di hubungkan dengan teori yang ada. Data-data yang dihubungkan dengan Kesesuaian Lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dengan Bidang Kerja. Kemudian disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan kemudian dideskripsikan.<sup>71</sup>

Sama halnya dengan Miles dan Huberman (1984) juga Yin (1987),<sup>72</sup> yang mengatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data atau verifikasi.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>72</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 192-194

## 1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam kegiatan reduksi data ini peneliti melakukan pemilahan-pemilahan terhadap data, tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, dan data yang merupakan ringkasan.

Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan penajaman data, penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data adalah menyajikan informasi yang telah terkumpulkan dan tersusun dengan rapi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, bentuk penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif, namun penyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kegiatan analisis yang dimulai sejak pengumpulan data, seorang peneliti dalam penelitian kualitatif ini sudah mulai mencari arti dan penjelasan-

penjelasan tentang setiap informasi atau data yang telah terkumpulkan dan telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

Data yang sudah diperoleh dipilah pilih atau diorganisasikan sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan masing-masing, yang bertujuan untuk menggambarkan secara aktual dan teratur tentang masalah penelitian sesuai data atau fakta yang didapat dari lapangan yaitu pada masyarakat di kecamatan Setia yang terdata sebagai anggota Program Keluarga Harapan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hasil wawancara atau data sesuai permasalahannya.
- b. Memilih data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.
- c. Menganalisis data yang diperoleh.
- d. Menarik kesimpulan.

Kesemua langkah analisis data yang dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan langkah yang saling terkait satu sama lain sejak sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pengertian ini analisis data merupakan upaya yang berlanjut dan terus-menerus.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid, hal.196

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh terdiri dari 1 Mukim yaitu Mukim Setia, 6 Desa definitif pada tahun 2016 dan ada 3 desa pemekaran pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2017 jumlah desa definitif keseluruhan menjadi 9 desa serta 27 dusun yang terletak berdekatan dengan ibukota kabupaten dengan jarak tempuh 8 Km dari pusat kota. Terletak diantara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia disebelah selatan dan disebelah utara berbatasan dengan pegunungan bukit barisan, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Tangan-Tangan di sebelah timur, dengan luas wilayah kecamatan setia secara keseluruhan yaitu 50,65 Hektar. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai.

Secara topografi kecamatan setia termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian 5 Km dari permukaan laut. Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran tinggi dan memiliki sudut lereng berkisar 0-9 % skala maberry. Secara geologi kecamatan setia memiliki tanah berupa tanah keras, gambut, dan tanah persawahan. Potensi sumber daya air yang dimiliki cukup besar Karena banyaknya sungai yang mengalir dalam wilayah kecamatan setia sehingga menjadi permasalahan bencana banjir setiap musim hujan tiba. Secara iklim mempunyai

katagori daerah sub tropis yang terdiri dari 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Jumlah penduduk Kecamatan Setia berjumlah sekitar 7.849 jiwa dengan rincian 4.012 jiwa laki-laki (51%) dan 3.837 jiwa perempuan (49%) dan jumlah kepala keluarga 1.986 dengan jumlah kepala keluarga miskin 539. Mata pencarian masyarakat kecamatan setia yang dominan yaitu petani sawah, pekebun, nelayan dan sebagian kecil PNS, TNI, POLRI serta pengusaha.<sup>74</sup>

### **B. Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Kepada masyarakat**

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan Operator PKH terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri serta beberapa instrumen wawancara. Peneliti melakukan observasi awal yaitu penelusuran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kecamatan Setia, berbeda-beda Desa yaitu Desa Lhang dan Desa Rambong. Proses penelitian berupa observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil observasi, Kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan, seperti terbantunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam membiaya sekolah anak-anak, terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita selain dapat pelayanan dari posyandu, bantuan dari PKH jadi tambahan buat

---

<sup>74</sup> Kecamatan Setia Dalam Angka, (BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, 2018), hal. 1-5.

pemenuhan gizi yang baik buat sianak, dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator PKH bapak Rahmat Yudri<sup>75</sup> yang mengatakan bahwa awal mulai PKH di Aceh Barat Daya di tahun 2013 yaitu berupa rekrutmen anggota pendamping PKH dan ditahun 2014 Program Keluarga Harapan mulai aktif. Program bantuan PKH bersifat menyeluruh untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat pelaksanaan awal tidak semua Kecamatan serentak ada datangnya program PKH tetapi bertahap hingga saat ini bantuan PKH sudah terlaksanakan disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil wawancara dengan bapak Rahmat Yudri mengatakan bahwa ada tiga program perlindungan sosial dalam PKH, yaitu: **Pertama Pendidikan**, dalam program pendidikan komponennya mencakup anak sekolah SD, SMP dan SMA. **Kedua Kesehatan**, dalam program kesehatan komponennya termasuk ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak pra-sekolah. **Ketiga Kesejahteraan Sosial**, dalam program ini komponennya yaitu penyandang disabilitas berat dan lansia usia 70 tahun ke atas.

Hasil Wawancara Peneliti dengan ibu Intan Fitriani yang mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan Sangat bermamfaat, karena sangat membantu keluarga kami dalam membiayai sekolah anak-anak, dulu beban tanggungan sekolah kedua anak kami yang satu kelas 5 SD dan kelas 3 SMP jumlah yang harus dikeluarkan lumayan besar sekarang beban tanggungan berkurang dengan

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Operator PKH bapak Rahmat Yudri, pada tanggal 5 September 2018

ada bantuan dari PKH.<sup>76</sup> Senada seperti yang di atas, hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Hayati<sup>77</sup> yang mengatakan bahwa hadirnya PKH sangat membantu keluarganya dalam proses pemenuhan gizi yang baik buat anaknya, selain dapat pelayanan dari Posyandu Desa, bantuan PKH jadi tambahan yang sangat berguna karena saya dapat membeli kebutuhan untuk balita saya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Baiti<sup>78</sup> mengatakan bahwa bantuan yang di terima dari program PKH dalam bentuk uang non-tunai. Keluarga kami sangat senang bisa merasakan mamfaat program dari PKH, karena dengan uang tersebut dapat membantu kami dalam memenuhi keperluan sekolah anak-anak.

Dari beberapa hasil wawancara mulai dari pihak pendamping PKH dan Jawaban yang sama juga diutarakan oleh KPM lainnya seperti ibu Malinda, ibu Suhaibah dan ibu Asra, jawabannya semua sama walaupun dengan penjelasan bahasa yang berbeda, seperti jawaban yang di atas penulis bisa mengetahui dan memahami mengenai apa saja Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Adapun program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk menunjang serta memperbaiki taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri dengan mendapatkan layanan difasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) ibu Intan Fitriani, pada tanggal 2 September Agustus 2018

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) ibu Nurhayati, pada tanggal 2 September 2018

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) ibu Nurbaiti, pada tanggal 3 September 2018

anggota keluarga sesuai kebutuhannya, ada tiga program dari PKH yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

*Pertama* Pendidikan, dimana semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengembangkan intelektualitas maupun prestasi akademik demi kemajuan sebuah bangsa. PKH memberikan dampak yang sangat positif dalam dunia pendidikan, partisipasi anak sekolah SD, SMP dan SMA sejalan dengan tujuan PKH untuk mendorong akses pendidikan kepada anak usia sekolah.

Adapun jumlah penerima mamfaat bidang pendidikan di Desa Rambong yaitu 36 KPM lebih banyak dari Desa Lhang dengan jumlah 35 KPM.<sup>79</sup>

*Kedua* Kesehatan, sama halnya dengan pendidikan, kesehatan sangat perlu diperhatikan karena sehat itu sangat berharga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka diperlukan sebuah pemetaan tingkat pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk melihat upaya pemerataan yang sudah dilakukan sekaligus untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan. Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik, pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. Kehadiran program PKH berusaha menurunkan angka gizi buruk pada bayi dan meningkatkan kesehatan ibu hamil dengan begitu proses kesehatan selalu terjaga.

Adapun jumlah penerima mamfaat bidang kesehatan di Desa Lhang yaitu 63 KPM lebih banyak dari Desa Rambong dengan jumlah 19 KPM.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH bapak Efendi, pada tanggal 29 Agustus 2018.

*Ketiga* Kesejahteraan Sosial, permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dengan baik. Akibatnya, masih ada warga yang mengalami hambatan tidak dapat menjalani kehidupan sosial secara layak dan bermartabat. Hadirnya program PKH berupaya untuk memenuhi serta memperhatikan proses pembangunan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan kehidupan sosial yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Adapun jumlah lansia yang mendapat bantuan PKH di Desa Lhang yaitu 14 KPM lebih banyak dari Desa Rambong dengan jumlah 3 KPM.<sup>81</sup>

### **C. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Barmawi Akfa<sup>82</sup> yang mengatakan bahwa Program PKH sudah berjalan selama empat tahun di desa ini, hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Ade Herman<sup>83</sup>, beliau menambahkan bahwa masyarakat yang terpilih sebagai penerima PKH bukan kami langsung yang memilihnya, tetapi data nama penerima bantuan PKH yang sampai pada kami datang dari pusat, jadi pusat yang menentukannya. Mengenai musyawarah tentu

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH bapak Efendi, pada tanggal 29 Agustus 2018.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH bapak Efendi, pada tanggal 29 Agustus 2018.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Desa Lhang Barmawi Akfa, pada tanggal 30 Agustus 2018.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Desa Rambong Ade Herman, pada tanggal 31 Agustus 2018.

ada dilaksanakan dengan tujuan membenarkan data tersebut, kami dari pihak aparaturnya gampong memantau agar masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH benar-benar masyarakat yang layak menerimanya atau tepat sasaran.

Sama seperti diatas hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH bapak Efendi<sup>84</sup> yang mengatakan bahwa masyarakat yang terpilih untuk menerima bantuan program PKH melalui Proses yaitu data yang diambil melalui Badan Pusat Statistik (BPS), kalau pada tahun 2015 dahulu merujuk pada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang kemudian digunakan oleh Kementerian Sosial dan ketika data tersebut sampai kepada Kementerian Sosial, data itu direndom (acak kembali) selanjutnya data dikirim kepihak Kabupaten yang seterusnya data tersebut diserahkan kepada pendamping. Data yang sudah ada divalidasi oleh pendamping maka hasil dari validasi itu muncul data yang bisa digunakan untuk program PKH. Memang pada awalnya ada data mentah terlebih dahulu setelah validasi dan datapun telah akurat, yang kaya dikeluarkan yang tidak masuk kriteria penerima bantuan PKH dikeluarkan maka dapatlah data yang sudah baku yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Operator PKH kepada peneliti bahwa Data awal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dikirim kepusat, pusat kemudian menyaring data setelah itu baru dikirim ke Kementerian Sosial. Selanjutnya baru dikembalikan ke daerah masing-masing. Karena pendamping PKH bukan yang memilih masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut tetapi tugas pendamping PKH hanya untuk mendampingi data yang sudah ada.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH bapak Efendi, pada tanggal 29 Agustus 2018.

Tahapan pelaksanaan program keluarga harapan dari hasil wawancara dengan pihak pendamping PKH ibu Marnita<sup>85</sup> mengatakan bahwa pertama kami menerima data dari pusat, setelah itu kami koordinasi dengan pihak kecamatan atau camat kemudian koordinasi bersama stakeholder atau keuchik selanjutnya baru kita buat pertemuan awal untuk memvalidasi data, mengentri data ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan terakhir final closing, baru setelah selesai itu semua masuklah tahap penyalurann dana kepada Keluarga Penerima Mamfaat (KPM).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuriah<sup>86</sup> mengatakan bahwa tahapan PKH pada awalnya mereka dikumpulkan pada pertemuan awal untuk memperjelas data dan masyarakat yang telah terpilih sebagai penerima PKH, kemudian tinggal menunggu kabar dari pendamping yang disampaikan kepada ketua kelompok masing-masing selanjutnya ketua kelompok memberitahu anggota kelompoknya dan dananya di ambil di Bank BRI.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Ida Rahmawati<sup>87</sup> mengatakan bahwa dalam setahun bantuan 4 kali kami terima, yaitu tahap 1: bulan Januari, Februari, Maret. Tahap 2: April, Mei, Juni. Tahap 3: Juli, Agustus, September. Tahap 4: Oktober, November, Desember. Jumlah bantuan yang kami terima untuk tahap pertama sampai tahap tiga berjumlah Rp.500.000 3x dan tahap ke empat senilai Rp.350.000, jadi total yang kami terima dalam setahun Rp.1.850.000.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH ibu Marnita, pada tanggal 29 Agustus 2018.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) ibu Nuriah, pada tanggal 4 September 2018

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) ibu Ida Rahmawati, pada tanggal 4 Agustus 2018

Dana PKH yang diberikan untuk tujuan membantu dalam pendidikan dan kesehatan anak tersebut tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan yang seharusnya, jadi dalam menjalankan strategi PKH Kepala Dinas Sosial<sup>88</sup> mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan koordinator PKH Kabupaten dan sebelum turun kelapangan Kadis terlebih dahulu mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) ke Camat juga Kades dengan menyatakan bahwa ini benar pendamping PKH, tanpa sepengetahuan Kadis pihak pendamping tidak bisa turun sembarangan kelokasi karena mereka dibawah pengawasan Kadis.

Program Keluarga Harapan telah dijalankan di Kecamatan Setia sejak tahun 2014 di 9 Desa. Masyarakat yang terdata sebagai peserta penerima Program Keluarga Harapan jumlah penerimanya yang berbeda setiap desanya.

Pada tahap pertemuan awal dilakukannya valid (perlengkapan) data terhadap peserta PKH yang terpilih, adanya pembagian kartu peserta, dan pemegang kartu di percayakan kepada perempuan, menurut pendamping PKH dalam program ini penerima bantuan lebih dipercayakan kepada perempuan karena perempuan lebih dapat dipercaya dan bertanggung jawab dari pada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu anak-anaknya baik dalam hal pendidikan dan juga kesehatan. Dalam pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menerima pengaduan dari masyarakat.

Pertemuan yang serupa menurut pendamping juga akan diadakan lagi sewaktu-waktu apabila diperlukan, apakah itu untuk sosialisasi, menerima pengaduan dari peserta atau keperluan yang lainnya maka dari itu diperlukannya

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Aceh Barat Daya bapak Ikwansyah, pada tanggal 4 September 2018

pembentukan kelompok dan adanya ketua agar dapat memudahkan pendamping dalam membangun komunikasi dengan masyarakatnya.

Apabila peserta jarang atau bahkan tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan pendamping maka perjalanan baik dan berhasil atau tidaknya program tersebut tidak dapat diketahui oleh pemerintah pusat dikarenakan pendamping tidak punya data dan bukti yang valid bagaimana hal yang sebenarnya terjadi dilapangan. Karena dalam program ini pendampinglah yang bertugas langsung dilapangan sebagai pendamping masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi komitmen dimana peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus menjalankan komitmennya yaitu, menghadiri fasilitas-fasilitas kesehatan maupun pendidikan sebagaimana yang tertera dalam persyaratannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), karena apabila komitmen tersebut tidak dijalankan maka pihak PKH akan memberikan sanksi terhadap KPM tersebut.

Tahap terakhir yaitu tahap pembayaran, dana yang telah ditetapkan diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan Program Keluarga Harapan, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemilihan peserta penerima bantuan PKH ini adalah Keluarga Miskin yang terdapat keluarga yang terdiri dari; ibu hamil, ibu nifas, anak-anak yang berusia dibawah atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan sekolah. Pemilihan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi indikator kemiskinan. Verifikasi indikator kemiskinan dilakukan melalui survey terhadap calon peserta yang dilakukan oleh BPS dan data pendukung lainnya, kemudian dari informasi

yang diperoleh melalui survey tersebut akan diurutkan tingkat Keluarga Miskin berdasarkan tingkat kemiskinannya. Hingga penetapan peserta penerima PKH ditentukan oleh pihak PKH pusat dengan jumlah perdesa yang telah ditetapkan.

Data yang telah ditetapkan kemudian dikirimkan ke daerah masing-masing tanpa melalui pengecekan terhadap keadaan rumah tangga sekaligus persyaratan yang ditentukan akan tetapi pengecekan yang dilakukan hanyalah dengan melihat daftar nama ibu peserta PKH apakah ada di gampong A, maka setelah itu mereka akan langsung ditetapkan sebagai peserta PKH, keterangan ini penulis dapatkan dari pendamping PKH.

Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang non-tunai namun bersyarat, peserta atau penerima akan mendapatkan haknya apabila memenuhi kewajiban, dan inilah yang membedakan Program Keluarga Harapan dengan program atau bantuan-bantuan lainnya. Hal ini terlihat dalam kerjasama pihak penanggulangan kemiskinan dengan dinas pendidikan dan juga kesehatan, PKH membantu mendorong masyarakat untuk menghadiri fasilitas yang telah tersedia yaitu pendidikan dan kesehatan dengan biaya yang disediakan oleh pemerintah, pada masing-masing fasilitas tersebut diwajibkan membuat absen kunjungan peserta PKH guna mengetahui bagaimana peserta dalam melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH yaitu mengunjungi fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, karena apabila ada beberapa kali mereka tidak hadir maka akan dikenakan sanksi, dengan demikian mereka yang tadinya bermalas-malasan untuk ke sekolah dan belajar setidaknya dapat mengurangi kemalasannya itu, demikian pula dengan kesehatan adapun mereka yang tadinya tidak peduli atau malas untuk

memperdulikan kesehatannya dan bayinya setidaknya dapat mengurangi kemalasan dan alasan mereka untuk tidak mengunjungi puskesmas atau posyandu.

Sebenarnya persyaratan ataupun kewajiban yang dimaksudkan dalam program ini bukanlah suatu hal yang memberatkan peserta akan tetapi ini adalah untuk kebaikan mereka, membantu masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kesehatannya dan juga membantu mereka untuk bangkit dari pada kemiskinan dengan terus menyemangati anak-anaknya, namun masih adapula peserta yang menganggap persyaratan ini suatu beban baginya. Adapun tujuan dari program keluarga harapan ini adalah untuk mewujudkan tujuan memutuskan rantai kemiskinan, mengurangi angka kematian bayi, balita dan ibu hamil.

Sebagaimana yang diakui oleh beberapa peserta PKH bahwa anak-anak mereka juga menyelesaikan sekolah hingga ke jenjang SMP, Dalam hal ini pendamping mengakui terus berupaya dari mereka untuk menasehati dan mendorong ibu-ibu tersebut untuk mau membujuk anak-anaknya agar tetap melanjutkan sekolahnya demi kelangsungan hidup mereka dengan memperbaiki perekonomian keluarga melalui anak-anak yang cerdas dan berkualitas.

Namun demikian dari sekian hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, keseluruhannya dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan yang di implementasikan oleh pemerintah dengan rancangan sedemikian rupa, yang berbeda dengan program lainnya dengan tujuan mengurangi kemiskinan telah banyak membantu masyarakat meskipun banyak yang mengeluh mengenai persyaratan dan dalam hal pengalihan dana bantuan, tetapi mereka bersyukur karena kemudian terbantu dengan dana Program Keluarga Harapan.

Dalam tujuan jangka panjang Program Keluarga Harapan yaitu memutuskan rantai kemiskinan dengan persyaratan yang diberikan yaitu menghadiri fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan.

#### **D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH ibu Marnita<sup>89</sup> mengatakan bahwa peserta yang mempunyai anak bayi, balita juga anak pra sekolah (apras) ibunya wajib membawa anak-anaknya keposyandu. Jadi, selama dia masih menjadi peserta PKH dia tetap membawa anaknya keposyandu. Selanjutnya ibu hamil, dia harus terdata dan juga harus selalu keposyandu, selama masih menjadi peserta PKH dia harus memenuhi komitmen jadi peserta yang terdaftar di posyandu. Kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, jadi selama itu masyarakat berpartisipasi untuk memberi motivasi kepada anaknya agar giat pergi sekolah setiap hari termasuk kerapian, atribut dan sebagainya selama dia menjadi peserta PKH.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH pak Efendi<sup>90</sup> yang mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang protes kenapa kami tidak mendapatkan bantuan PKH, masyarakat mengira setiap penerima bantuan Program Keluarga Harapan, pihak pendamping PKH yang mendata masyarakat, kenapa bisa demikian pertama data yang diberi dari pusat tidak sesuai seperti yang di lapangan artinya menurut sebagian masyarakat ada yang mendapat PKH itu orang mampu sedangkan orang yang kurang mampu tidak dapat. Jadi, ada yang komplin kepada

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH ibu Marnita, pada tanggal 29 Agustus 2018.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Pendamping PKH pak Efendi, pada tanggal 29 Agustus 2018.

stakeholder bahwasanya datanya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan maksudnya tidak tepat sasaran. Kedua, karena saat pertama penerima PKH tidak banyak hanya 15% yang ada di Kecamatan Setia jadi oleh karena itu banyak masyarakat yang protes, jadi kami hanya mencoba jelaskan kepada masyarakat bagaimana data itu bisa ada sama kami, jadi dengan adanya penjelasan dari kami sehingga masyarakat tahu darimana proses data ini ada.

Adapun hasil dari wawancara di atas menerangkan bahwa faktor pendukung implementasi program PKH ialah masyarakat yang patuh akan aturan program PKH sehingga sangat mendukung para pendamping dalam mendampingi masyarakat. Kemudian masyarakat juga mau berpartisipasi dengan mematuhi segala komitmen sebagai peserta PKH. Selain itu, faktor pendukung pelaksanaan program adalah dukungan finansial yang lancar sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu pendanaan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup KPM sebagai tujuan program dapat meningkat.

Sedangkan hasil penelitian lainnya bahwa faktor penghambat merupakan sebuah acuan bagi pelaksanaan program sebagai hasil evaluasi. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH ini yaitu kurang pemahannya KPM terhadap aturan bagaimana mekanisme program yang terlaksana. Hal ini

dibuktikan dengan komplek yang dilemparkan oleh masyarakat kepada pendamping PKH maupun aparat gampong, sebagian masyarakat kurang paham bagaimana peran pendamping serta kebijakan yang diajalkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program PKH.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kecamatan Setia merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas wilayah kecamatan setia secara keseluruhan yaitu 50,65 Hektar, yang terdiri dari 9 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Setia berjumlah sekitar 7.849 jiwa dengan rincian 4.012 jiwa laki-laki (51%) dan 3.837 jiwa perempuan (49%) dan jumlah kepala keluarga 1.986 dengan jumlah kepala keluarga miskin 539.

Adapun beberapa kesimpulan lainnya yang dapat peneliti rangkum dari beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Adapun perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu Pertama Pendidikan, dalam program pendidikan mencakup anak sekolah SD, SMP dan SMA. Kedua Kesehatan, dalam program kesehatan termasuk ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak pra-sekolah. Ketiga Kesejahteraan Sosial, dalam program ini yaitu disabilitas dan lansia.
2. Implementasi PKH di Kecamatan Setia terdata dalam penerima Program Keluarga Harapan yaitu pada tahun 2014. Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan Non-tunai bersyarat kepada penerimanya, dan bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan ketentuan;

memiliki ibu hamil dan nifas/menyusui, anak balita, anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA).

Adapun tahapan Program Keluarga Harapan:

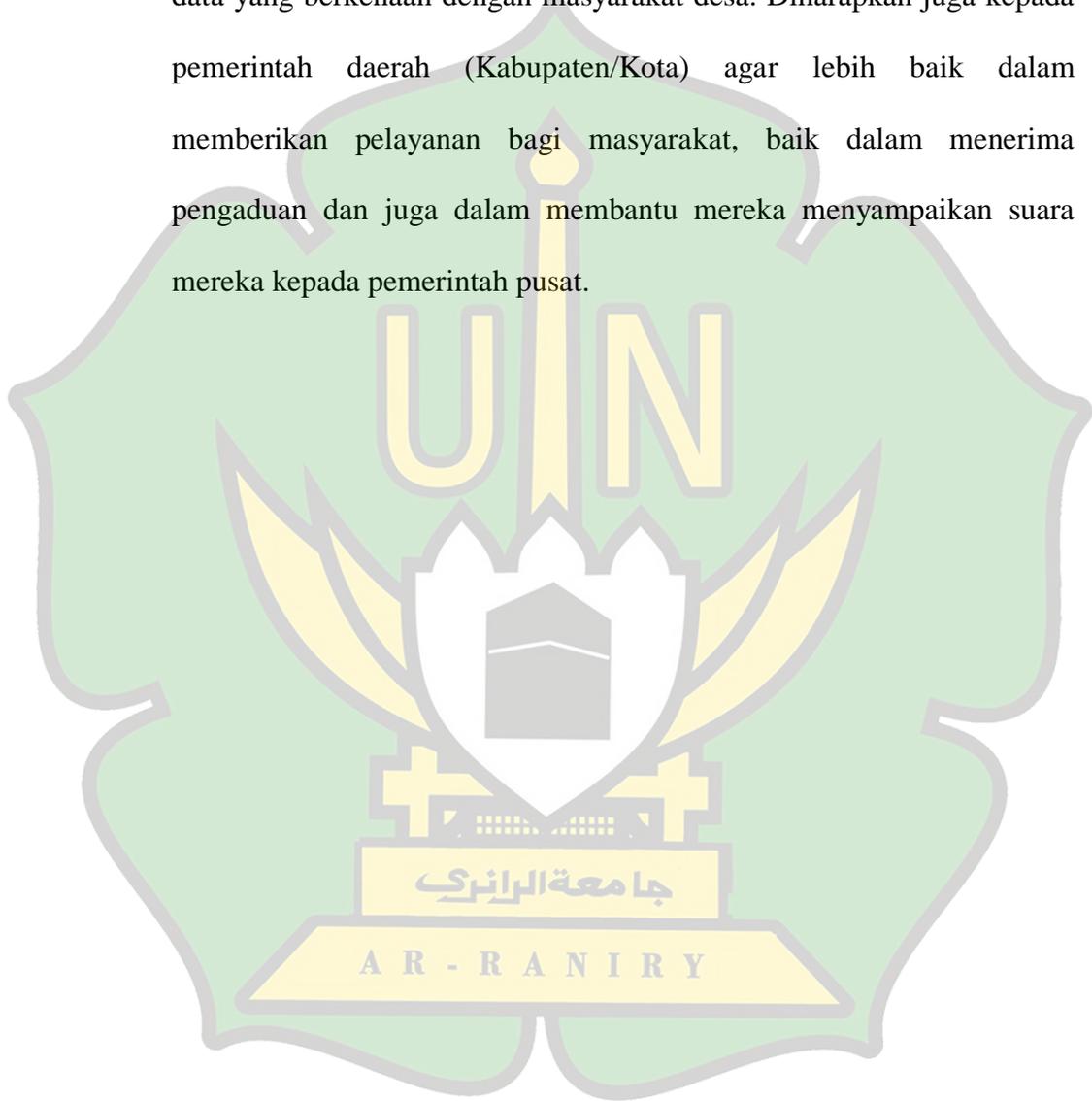
- a. Tahap pertemuan awal
  - b. Memasukan data ke Sistem Informasi Manajemen
  - c. Pembayaran
  - d. Vefikasi komitmen
3. Adapun faktor pendorong dan penghambat program Keluarga Harapan yang di laksanakan di kecamatan Setia yaitu meski belum terlaksanakan dengan sempurna karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang jalannya program, terlebih lagi keluarga-keluarga miskin yang ada yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Walaupun demikian, masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat peserta Program Keluarga Harapan agar dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya, terutama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbentuk bantuan Non-tunai bersyarat dan diberikan kepada KPM.
2. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dalam menyampaikan keluhannya kepada pemerintah lebih baik menggunakan perwakilan dari mereka agar terhindar dari terjadinya perdebatan. Bagi masyarakat

yang tidak mendapatkan bantuan agar tidak saling menyalahkan dengan aparaturnya dan pendamping PKH.

3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih teliti dalam mengambil data yang berkenaan dengan masyarakat desa. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) agar lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik dalam menerima pengaduan dan juga dalam membantu mereka menyampaikan suara mereka kepada pemerintah pusat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT Raja Gafindo Persada.
- Agostiono, 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta, Rajawali Press.
- Alief, Ihsan. 1986. *Islam dan kemiskinan: Soal Aktualisasi Keagamaan dalam Mimbar Ulama*.
- Ariskunto, Suharismi. 1998 *Penelitian Program Pendidikan*, Yogyakarta, Bima Aksara.
- Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh. 2014. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Pusat Bahasa*, ed.-cet 2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kholid. 2011. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Fajria, Nanda. 2014. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Remaja Rosdakarya).

- Harahap, Syahrin. 1998. *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta, Pt. Tiara Wacana Yogya.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kartasapoetra, Hartini. 2007. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementrian Sosial RI. 2016. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Kementrian Sosial RI. 2018. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*, Jakarta.
- Kecamatan Setia Dalam Angka. 2017. BPS Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Muhaimin, dkk, 2009. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Nafis, Badratin. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengembangan Pendidikan Masyarakat*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry.
- Rustanto, Bambang. 2014. *Sistem Perlindungan Sosial*, (Bandung, STKSPRESS.
- Rusyan, Tabrani. 2006. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Semiawan, Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: gramedia.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kualitatif Dan R & D)*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi .2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Suharto, Edi. 2013. Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: *Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung, Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2009. *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung, Alfabeta.

Suprayogo, Imam. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Umar, Husen. 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

usman, Husaini. 2009. *Metodologi penelitian sosial*, edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.

Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Siduarjo, Bayumedia.

W.J.S Poerwadarminta. 20017. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

#### **Referensi lain:**

[www.artikelsiana.com/pengertian-masyarakat-para-ahli-definisi.html](http://www.artikelsiana.com/pengertian-masyarakat-para-ahli-definisi.html). diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

<https://anzdoc.com/skripsi-implementasi-program-keluarga-harapan-pkh-di-kecamatan.html>, diakses pada tanggal 24 januari 2019.

<http://www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-september-2017>-diakses 12 juli 2018

<http://justinlase.blogspot.com/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html/> diakses pada tanggal 14 juli 2018.

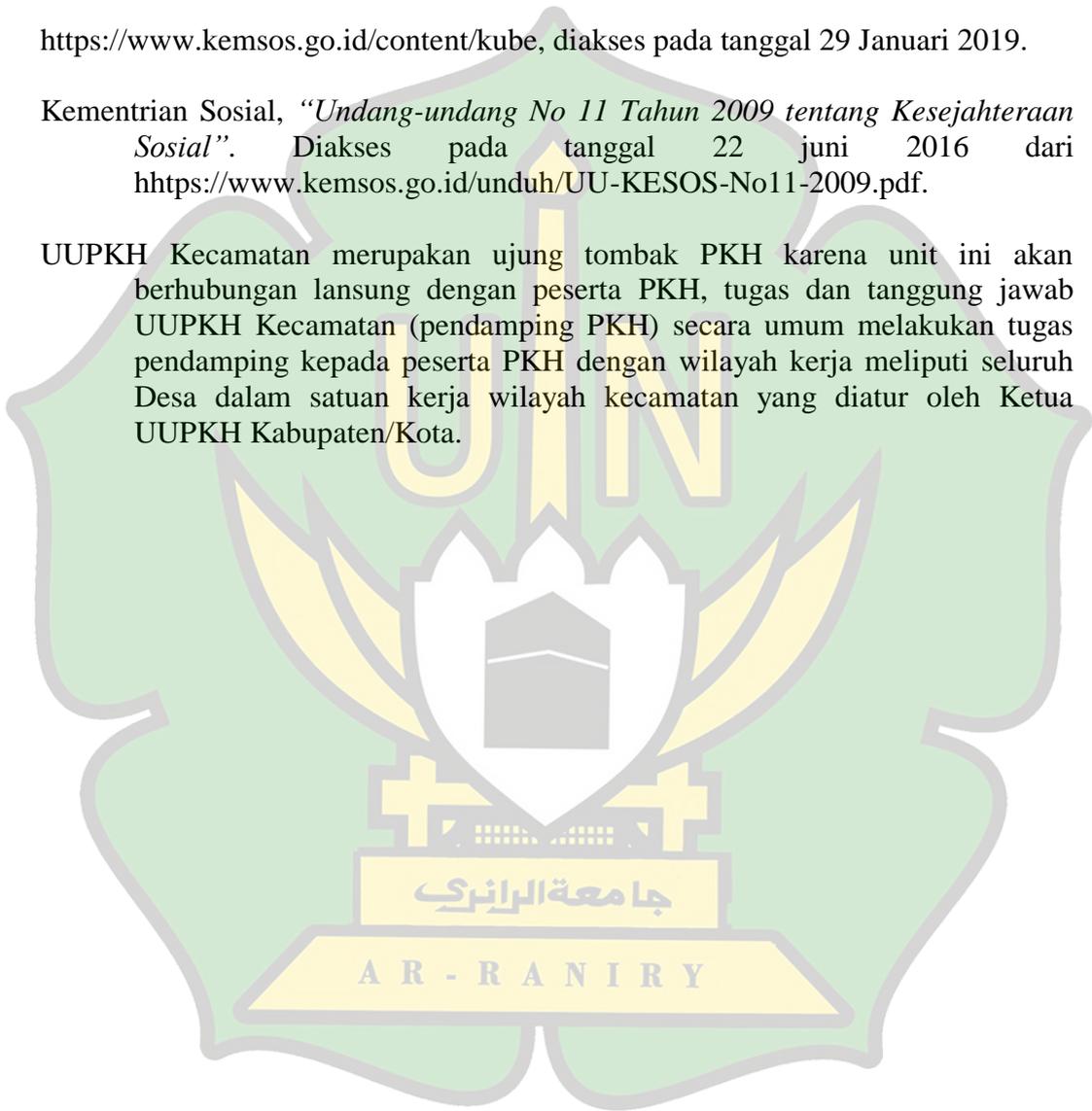
<http://digilib.unila.ac.id/54602/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019.

<http://www.google.co.id/amp/s/alihamdan.id/implementasi/amp/> diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

<https://www.kemsos.go.id/content/kube>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019.

Kementrian Sosial, “*Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*”. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016 dari <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No11-2009.pdf>.

UUPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH, tugas dan tanggung jawab UUPKH Kecamatan (pendamping PKH) secara umum melakukan tugas pendamping kepada peserta PKH dengan wilayah kerja meliputi seluruh Desa dalam satuan kerja wilayah kecamatan yang diatur oleh Ketua UUPKH Kabupaten/Kota.



## **Instrumen Wawancara**

**1. Rumusan Masalah:** Apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat.

**a. Informan Penelitian:** Kepala Dinas Sosialis Kabupaten Aceh Barat Daya.

**b. Pertanyaan Penelitian:**

- 1) Sejak kapan PKH di Kabupaten Aceh Barat Daya mulai dibentuk dan dijalankan?
- 2) Apa saja program perlindungan sosial yang terdapat dalam PKH?
- 3) Bagaimanakah strategi Dinsos dalam menjalankan PKH di Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 4) Bagaimanakah sistem dalam memilih masyarakat sebagai penerima bantuan PKH, apa pihak pendamping PKH yang memilih atau pihak aparatur gampong atau bagaimana?
- 5) Jika masyarakat miskin yang tidak memiliki komponen PKH, apakah keluarga tersebut mendapatkan bantuan PKH atau bagaimana ?
- 6) Bagaimana tanggapan bapak mengenai masyarakat yang komplin karena mereka tidak mendapatkan bantuan PKH padahal mereka layak untuk menerima bantuan tersebut?
- 7) Apakah program PKH bersifat menyeluruh untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 8) Berapa persen masyarakat baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang menjadi sasaran Program?

**2. Rumusan Masalah:** Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat.

**a. Informan Penelitian:** 2 orang Keuchik mewakili seluruh keuchik dalam Kecamatan Setia.

**b. Pertanyaan Penelitian:**

- 1) Berapakah jumlah anggota masyarakat di Desa bapak yang mendapatkan perlindungan sosial PKH?
- 2) Sudah berapa lamakah Program Keluarga Harapan dilaksanakan?

- 3) Bagaimanakah sistem pemilihan sebagai anggota PKH yang dilakukan di Desa ini, adakah melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat atau hanya antara perangkat desa dan pendamping saja ?
- 4) Adakah sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak pelaksana terhadap masyarakat sebelumnya?
- 5) Apakah program PKH berjalan lancar di Desa bapak atau bagaimana?
- 6) Bagaimanakah perkembangan masyarakat setelah menerima bantuan Program Keluarga Harapan?
- 7) Apakah masyarakat di Desa bapak ada yang komplin dengan program PKH ini?

**c. Subjek Penelitian:** Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) Kecamatan Setia.

**d. Pertanyaan Penelitian:**

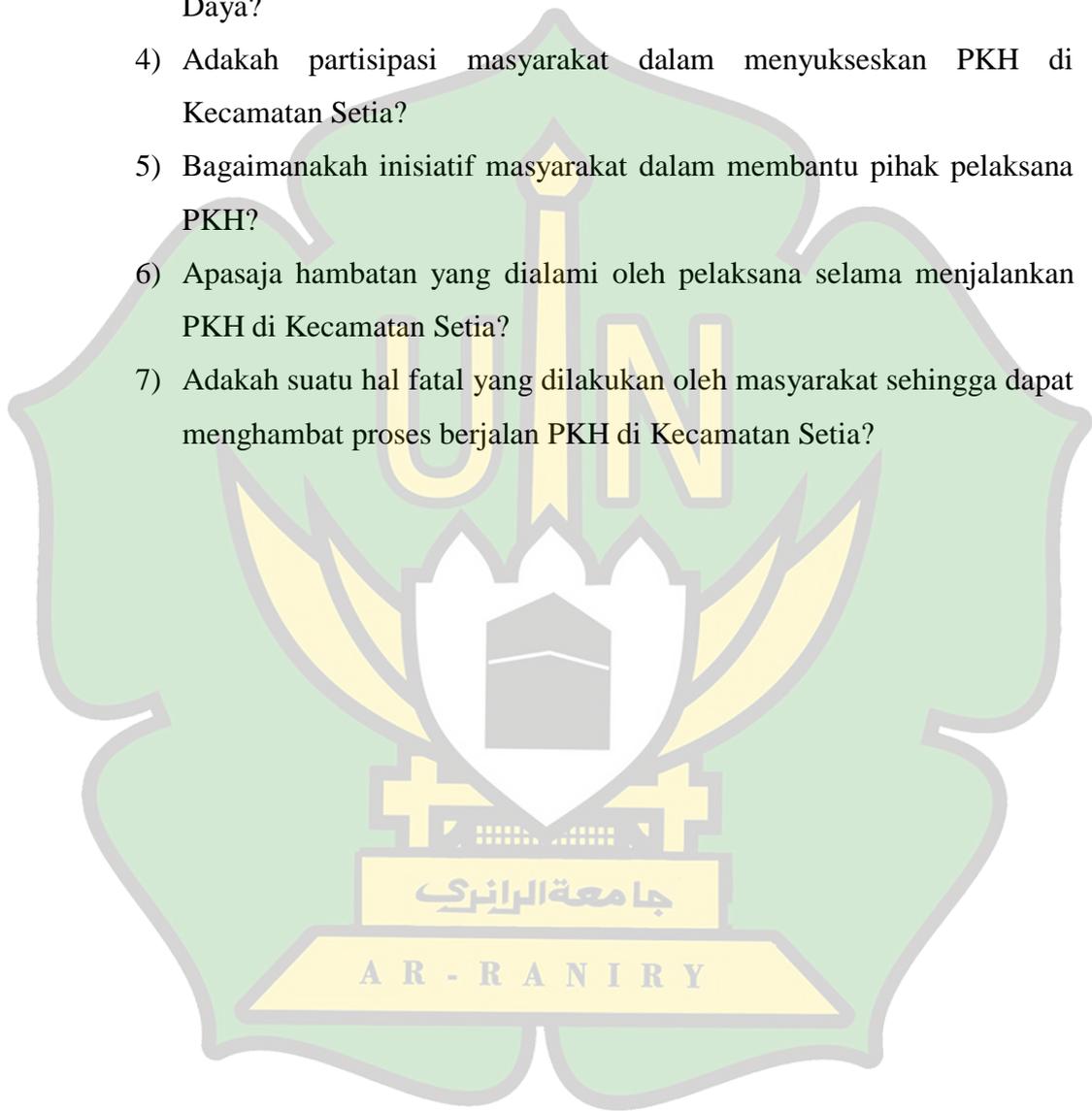
- 1) Sudah berapa lama ibu/bapak terdata sebagai anggota Program Keluarga Harapan?
- 2) Bantuan dalam bentuk apakah yang ibu/bapak terima dari PKH?
- 3) Bagaimanakah mamfaat yang ibu/bapak rasakan dari PKH ini?
- 4) Berapa kali dalam setahun bantuan tersebut diberikan?
- 5) Bagaimana ibu/bapak dapat mengetahui bahwa bantuannya telah dapat diambil?
- 6) Apakah ibu/bapak memenuhi kriteria penerima bantuan dari PKH?
- 7) Adakah pendampingan dari pelaksana program terhadap masyarakat dari awal hingga saat ini?
- 8) Adakah pengawasan dari pihak pelaksana program ke desa ini?
- 9) Adakah keluhan yang ibu/bapak alami terhadap PKH?

**3. Rumusan Masalah:** Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH).

**a. Informan Penelitian:** Pendamping PKH Kecamatan Setia.

**b. Pertanyaan Penelitian:**

- 1) Bagaimanakah pihak pelaksana program dalam memilih masyarakat sebagai anggota PKH?
- 2) Apa saja kriteria calon penerima program perlindungan sosial PKH?
- 3) Siapakah penanggung jawab PKH di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 4) Adakah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PKH di Kecamatan Setia?
- 5) Bagaimanakah inisiatif masyarakat dalam membantu pihak pelaksana PKH?
- 6) Apasaja hambatan yang dialami oleh pelaksana selama menjalankan PKH di Kecamatan Setia?
- 7) Adakah suatu hal fatal yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat menghambat proses berjalan PKH di Kecamatan Setia?



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B 2113/Un.08/FDK/KP.00.4/04/2018**

**Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 06 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Muchlis Azis, M. Si..... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)  
2) Zamzami, S.Sos.i., M.Kesos..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Cut Razi Mirsandi  
NIM/Jurusan : 140404059/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 02 April 2018 M  
16 Rajab 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
Kusmawati Hatta



- Tembusan:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
5. Arsip.

Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 02 April 2019



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3922/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2018  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 14 Agustus 2018

Kepada

- Yth, **1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya**  
**2. Camat Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya**  
**3. Keuchik Gampong Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya**  
**4. Pendamping PKH Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya**

Di -

**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Cut Razi Mirsandi / 140404059**  
Semester/Jurusan : **IX / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**  
Alamat sekarang : **Desa Barabung**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Stuydi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)"**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Ar-Raniry,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**KECAMATAN SETIA**  
JALAN NASIONAL KM. 382 TELP. : (0659) ..... Kode Pos 23763  
**L H A N G**

Nomor: 006/1343/2018

Dengan Hormat

1. Sehubungan dengan adanya surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRI Banda Aceh dengan **Nomor: B.3922/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2018** dengan perihal **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**.
2. Menindaklanjuti dari poin pertama di atas, maka dengan ini membertarkan bahwasanya kegiatan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Ar-Raniry telah diselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan judul skripsi yang di ajukan oleh:

Nama/Nim : **Cut Razi Mirsandi / 140404059**  
Semester//Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul Skripsi : **"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberi Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Study di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)"**

3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lhang , 03 September 2018

Camat Setia,  
Kabupaten Aceh Barat Daya



AR - RANIRI

**RAIEN S.Pd.SD**

Nip. 19671204 198910 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**KECAMATAN SETIA**  
**GAMPONG LHANG**

Sekretariat : Jalan Nasional Ds. Lhang – Pos : 23763

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 268 / LH / VIII / 2018

Keuchik Gampong Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya,  
menerangkan bahwa:

Nama : **Cut Razi Mirsandi**  
Tempat/Tgl Lahir : Lhang, 05 April 2018  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bahagia, Gampong Lhang, Kecamatan Setia,  
Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar bahwa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di desa kami pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan judul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Di Keluarkan : Lhang  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2018  
Keuchik Gampong Lhang

  
**BARMAWI AKFA**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SETIA  
GAMPONG RAMBONG

Sekretariat : Jalan T. Usman Ds. Rambong – Pos : 23763

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 274/RB/VIII/2018

Keuchik Gampong Rambong Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya,  
menerangkan bahwa:

Nama : Cut Razi Mirsandi  
Tempat/Tgl Lahir : Lhang, 05 April 2018  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Bahagia, Gampong Lhang, Kecamatan Setia,  
Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar bahwa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di desa kami  
pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan judul "*Implementasi Program Keluarga  
Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi  
di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan  
seperlunya.

Di Keluarkan : Rambong  
pada Tanggal : 31 Agustus 2018  
Keuchik Gampong Rambong





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PPKH)**



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Jl. Letkol BB. Jalal Desa Pulau Kayu – Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya Telp. ☎ (0659) 91073

No : 006/09-2018/PKHABDYA

Dengan Hormat

1. Sehubungan dengan adanya surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh dengan *Nomor : B.3922/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2018* dengan perihal *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*.
2. Menindaklanjuti dari Poin pertama di atas, maka dengan ini membenarkan bahwasanya kegiatan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Ar-Raniry telah diselesaikan dengan lancar dan sesuai dengan Judul skripsi yang di ajukan Oleh :

Nama/Nim : **Cut Razi Mirsandi / 140404059**  
Semester/Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul Skripsi : ***“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Study di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”***

3. Demikian surat ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Blang Pidie, 05 September 2018  
Korkab PKH Kabupaten Aceh Barat Daya

AR - RANI

**INDRA PRATAMA, ST**

NPP. 19860423 201311 1 001

## DAFTAR GAMBAR



Wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya.



Wawancara bersama Operator PKH Kabupaten Aceh Barat Daya.



Wawancara bersama Pendamping PKH Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.



Wawancara bersama Pendamping PKH Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya.



Wawancara bersama Keuchik Desa Rambong Kecamatan Setia.



Wawancara bersama Keuchik Desa Lhang Kecamatan Setia.



Observasi bersama pendamping PKH saat mengecek kehadiran siswa di SDN 1 Lhang Suak



Observasi bersama pendamping PKH saat mendampingi KPM ke posyandu



Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Rambong Kecamatan Setia



Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Lhang Kecamatan Setia.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Razi Mirsandi  
Tempat / Tanggal Lahir : Lhang, 5 April 1995  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Desa Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar  
Asal : Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya  
Telp / Hp : 081269242375  
E-Mail : Cutrazimirsandi13@gmail.com  
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

### **Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 1 Lhang Suak  
SLTP : SMPN 1 Setia  
SLTA : SMAN 1 Setia  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

### **Orang Tua / Wali**

Nama Ayah : Alm. Nyak Gam  
Nama Ibu : Ardianiwati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Desa Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 14 Januari 2019  
Penulis,

Cut Razi Mirsandi